

ARUS TOP-DOWN DAN BOTTOM-UP PADA GERAKAN DIALOG ANTAR AGAMA DI INDONESIA

Muhammad¹ Nurlaila²

1. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondence: muhammadsthima@ar-raniry.ac.id¹, nurlaila@ar-raniry.ac.id²

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Kajian Library
Research

Sitasi Cantuman:

Muhammad dan
Nurlaila. (2021). Arus
Top-Down Dan Bottom-
Up Pada Gerakan
Dialog Antar Agama Di
Indonesia. *Abrahamic
Religions: Jurnal Studi
Agama-Agama (ARJ)*,
1(2), 159-171.

DOI:

[10.22373/arj.v1i2.10659](https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.10659)

Hak Cipta © 2021.
Dimiliki oleh Penulis,
dipublikasi oleh ARJ

Dikirim: Juni 2021
Direview: Juli 2021
Dipublikasi: September
2021

ABSTRACT

The interfaith dialogue movement in the top-down current as described above, namely the movement originating from the state, was welcomed by various communities in Indonesia as a bottom-up current, namely the interfaith dialogue movement originating from the people. At least in this bottom-up flow, there are two communities, namely dialogue developed in academic institutions, and dialogue conducted or facilitated by civil society institutions, such as NGOs (Non-Governmental Organizations), both focusing on dialogue and raising issues. -Other issues related to dialogue. In this research, the researcher focuses only on two groups, namely the state (top-down current) and academic institutions (bottom-up current) trying to examine religious movements in the realm of inter-religious dialogue using social movement theory. There are three key concepts in social movement theory which usually play a very important role in determining the success of collective action. The three concepts include (1) political opportunity structure, (2) mobilizing structures, and (3) framing of action.

Keywords: *Top-Down, Bottom-Up, Interfaith Dialogue, Indonesia.*

ABSTRAK

Gerakan dialog antar agama dalam arus top-down sebagaimana digambarkan di atas, yaitu gerakan yang bersumber dari negara, disambut oleh berbagai komunitas di Indonesia sebagai arus bottom-up, yaitu gerakan dialog antar agama yang bersumber dari rakyat. Setidaknya dalam arus bottom-up ini terdapat dua komunitas, yaitu dialog yang dikembangkan di lembaga-lembaga akademis, dan dialog yang dilakukan atau difasilitasi oleh lembaga masyarakat sipil, semisal LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), baik yang memfokuskan pada dialog, maupun yang mengangkat isu-isu lain yang bersentuhan dengan dialog. Pada research ini, peneliti memfokuskan hanya pada dua kelompok, yaitu negara (arus top-down) dan lembaga-lembaga akademis (arus bottom-up) mencoba mengkaji gerakan keagamaan dalam ranah dialog antar agama ini dengan memakai teori gerakan sosial. Terdapat tiga konsep kunci dalam teori gerakan sosial yang biasanya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu meliputi (1) struktur kesempatan politik (political opportunity structure), (2) struktur mobilisasi (mobilizing structures), dan (3) pbingkaiian aksi (framing).

Kata Kunci: *Arus Top-Down, Bottom-Up, Dialog Antar Agama, Indonesia*

A. Pendahuluan:

Teologi metafisik adalah kajian yang membahas tentang Tuhan. Tuhan sebagai Sebelum datangnya era modern yang begitu cepat mengglobal, manusia hidup dalam peradaban era monolog (*age of monologue*). Di satu sisi, manusia bisa berkelana ke penjuru dunia manapun yang ia sukai. Di sisi lain, berbagai elemen kehidupan yang berasal dari seluruh dunia berduyun-duyun menghampiri kehidupannya. Sebuah keniscayaan tak terelakkan terjadi, perubahan dari era monolog ke era dialog (*from the age of monologue to the age of dialogue*) (Leonard Swidler dan Paul Mojzes : 2000). Perubahan peradaban manusia ini meniscayakan evolusi pemahaman pada pilar-pilarnya. Salah satu pilar peradaban manusia adalah agama. Dengan demikian, baik pemahaman keagamaan (Zaimul Am : 2002) maupun pemahaman tentang agama (Daniel L. Pals : 2012) ikut berkembang mengikuti alur peradaban.

Berlandaskan hal di atas, sejarah menuntut berbagai komunitas umat beragama memasuki era dialog. Beberapa kalangan pun menegaskan urgensi Dialog Antar Agama (*interreligious dialogue*) (J.B. Banawiratma : 2010), dalam keadaan dunia yang semakin mengkhawatirkan, guna menghindari berbagai tragedi kemanusiaan yang tidak jarang berorientasi pada sentimen keagamaan. Daniel C. Maguire mengingatkan bahwa pada era sebelumnya, agama-agama dunia tumbuh secara terpisah. Namun agama-agama tersebut dengan cepat berpisah dan mengambil jalannya sendiri-sendiri. Mereka sering memiliki hubungan yang bersifat permusuhan, bahkan peperangan, pembunuhan berencana, dan perang suci (Daniel C. Maguire : 2004).

Swidler pun menegaskan, dialog bukanlah debat (*dialogue is not debate*) (Leonard Swidler dan Paul Mojzes : 2000). Di dalam debat, seseorang menciptakan jarak dan mendistorsi pemahaman terhadap 'yang lain'. Maka kecenderungan yang terjadi adalah persaingan demi membuktikan sebuah kebenaran. Sedangkan dialog, sebagai sebuah

paradigma, adalah sebuah cara mencari, menjelajah dan mendapatkan kebijaksanaan, wawasan, dan kebenaran agama dan ideologi. Pada tataran praktis, dialog diarahkan agar menghasilkan kebaikan bersama, menumbuhkan sikap saling pengertian, dan mewujudkan dalam kerja sama kemanusiaan secara luas. Paul F Knitter pun mengingatkan bahwa umat beragama harus berupaya saling mengerti dan berbicara atas dasar komitmen bersama terhadap dua hal yang menjadi keprihatinan peradaban kontemporer, yaitu kesejahteraan umat manusia dan lingkungan (Paul F. Knitter : 1995).

Meskipun aktivitas dialog antar umat beragama sesungguhnya telah terjadi sejak awal mula pertemuan dua orang berbeda agama, dan hal tersebut terjadi sejak kedatangan pertama kali para penyiar, pewarta, misionaris, da'i atau mubaligh suatu agama tertentu ke komunitas agama lain, namun pembahasan dalam penelitian ini tidaklah memotret fenomena sejauh itu. Karena jika hal ini dilakukan, maka tak ada bedanya dengan pembahasan tentang sejarah agama. Bila hal tersebut dikerucutkan pada lokus Indonesia, maka yang akan dibahas adalah sejarah agama di Indonesia. Tidaklah demikian dengan makalah ini. Topik dialog antar agama di Indonesia dalam makalah ini dibatasi semenjak dialog itu mendapatkan bentuknya yang lebih terorganisir dan institusional.

Bila pembatasan di atas dilakukan, maka wacana dialog antarumat beragama secara institusional pertama kali dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Departemen Agama. Peristiwa perdananya adalah Musyawarah Antaragama, yang dilaksanakan di Jakarta, 30 November 1967. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Agama, KH M. Dachlan, dan dihadiri oleh sekitar 20 tokoh Muslim, Protestan, dan Katolik. Latar belakang Musyawarah Antaragama ini adalah adanya ketegangan dan konflik agama yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama antara umat Islam dan Kristen, sebagai lanjutan dari konflik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menginisiasi kudeta pemerintah Indonesia pada tahun 1965, dan dapat digagalkan. Dalam Musyawarah Antaragama tersebut, pemerintah berharap tidak ada satu kelompok agama pun yang boleh mengajak umat beragama lain untuk mengikuti agama mereka. Poin inilah yang menjadikan pertemuan awal dialog antarumat beragama di Indonesia gagal mencapai kesepakatan. Penolakan terhadap poin krusial itu datang dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), yang menyatakan bahwa umat Kristen harus berupaya menjaga praktik keagamaan yang damai di seluruh wilayah Indonesia, dengan tetap terus menyebarkan Kitab Injil dan menanggung segala resiko dari kegiatan penyebaran itu.

Gerakan dialog antar agama dalam arus top-down sebagaimana digambarkan di atas, yaitu gerakan yang bersumber dari negara, disambut oleh berbagai komunitas di Indonesia sebagai arus bottom-up, yaitu gerakan dialog antar agama yang bersumber dari rakyat. Setidaknya dalam arus bottom-up ini terdapat dua komunitas, yaitu dialog yang dikembangkan di lembaga-lembaga akademis, dan dialog yang dilakukan atau difasilitasi oleh lembaga masyarakat sipil, semisal LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), baik yang memfokuskan pada dialog, maupun yang mengangkat isu-isu lain yang bersentuhan dengan dialog.

B. Metode Penelitian

Research ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, maupun artikel jurnal ilmiah. Peneliti berusaha memenuhi dua kriteria dalam pemilihan sumber bacaan, yaitu: a) prinsip kemutakhiran (*recency*); b) prinsip relevansi (*relevance*) (Nursapia Harahap : 2014). Untuk memenuhi kedua kriteria tersebut, maka peneliti menelusuri setidaknya tiga situs pencarian jurnal ilmiah. Untuk jurnal dalam negeri, peneliti menelusuri dua situs, yaitu www.moraref.or.id, dan www.portalgaruda.org. Sedang untuk jurnal luar negeri, peneliti menelusuri situs www.doaj.org.

C. Wacana dan Praktik Dialog Antar Umat Beragama oleh Negara

Dalam kajian filsafat, ilmu yang membahas tentang persolan ketuhanan dikenal Kerukunan Umat Beragama (KUB) belum menjadi fokus perhatian para pendiri Negara Indonesia. Permasalahan utama mereka saat itu adalah integrasi bangsa dan mempertahankan kemerdekaan dari upaya perebutan kembali kekuasaan politik oleh para penjajah. Pendirian Departemen Agama pun bukanlah berlatar belakang KUB, tetapi berdasar kompromi bentuk negara antara negara sekular dan negara berdasar agama (Islam khususnya). Mujiburrahman bahkan menyatakan bahwa kebijakan negara terkait keragaman agama di Indonesia tidak bisa dipahami tanpa menyadari kompromitas itu. Sehingga kadangkala kebijakan tersebut cenderung ke arah sekuler, tidak jarang pula cenderung ke arah Islami, tetapi bagaimanapun tidak pernah benar-benar berorientasi sekuler maupun Islami (Mujiburrahman : Vol. 46, No. 1, 2008). Departemen Agama dibentuk dengan Ketetapan Pemerintah pada 2 Januari 1946, No. 1/SD/1946. KUB mendapatkan perhatian setelah muncul ketegangan antar umat beragama pasca pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Musyawaharah Antaragama yang dilaksanakan di Jakarta, 30 November 1967 adalah peristiwa awal secara institusional negara dalam ranah dialog antar agama. Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan, namun konsep kerukunan telah dicoba untuk dirumuskan, yaitu bahwa masing-masing pemeluk agama menahan diri dari membujuk penganut agama lain untuk masuk ke agama penyeru. Inilah orientasi awal program dialog antar agama era Orde Baru di bawah pimpinan Menteri Agama saat itu, KH M. Dachlan. Maka pada tahun 1969, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama No. 01/BER/MDN-MAG/1969, tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh para pemeluknya. Inilah kebijakan politik KUB perdana pemerintah Indonesia. Dalam SKB ini, terdapat beberapa aturan tentang kepala daerah yang harus memonitor propaganda dan ibadah para pemeluk agama sehingga tidak terjadi konflik. Aturan lain adalah tentang pembangunan rumah ibadah yang harus mendapatkan izin dari gubernur propinsi atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengatur masalah tersebut.

Konsep awal ini semakin jelas dalam istilah yang digunakan oleh Menteri Agama Mukti Ali (1971-1978), yaitu *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Saat itu,



Mukti Ali menghadiri kegiatan Dialog Antar Agama yang diselenggarakan Sidang Dewan Gereja Sedunia di Ajaltoun, Libanon. Dalam acara tersebut ia membawakan makalah dengan judul *Dialogue Between Muslims and Christians in Indonesia and it's Problems* (A. Mukti Ali : 1970). Tulisannya itu merupakan ungkapan jujur, betapa dialog antar agama masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Kerap masih ada kelompok-kelompok yang berhasrat mencederai dialog yang selama ini dibangun (Djam'annuri : 1993). Beberapa peneliti menilai gagasan Mukti Ali lebih elitis dan kurang menyentuh masyarakat akar rumput. Namun peneliti lain menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Mukti Ali, Departemen Agama telah melaksanakan beberapa langkah praktis dalam ranah dialog antar agama.

Berbagai konsep yang diinisiasi oleh Menteri Agama ini terkait erat dengan visi besar Orde Baru yang menginginkan masyarakat melupakan perbedaan dan lebih berfokus kepada kepentingan bersama demi pembangunan nasional. Paradigma Orde Baru adalah persatuan dan kesatuan. Kebijakan yang diambil adalah membatasi ekspresi perbedaan dan keragaman. Visi Orde Baru ini dilanjutkan oleh Menteri Agama berikutnya yang berasal dari kalangan militer, yaitu Alamsyah Prawiranegara (1978-1983). Ia mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK), yaitu SK No. 70/1978 dan SK No. 77/1978, yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 1/1979. SK 77/1978 membatasi bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. SK tersebut mengatur bahwa bantuan hanya boleh diberikan dengan persetujuan atau rekomendasi dari Menteri Agama. SK tersebut juga mengatur pembatasan terhadap keterlibatan orang-orang asing dalam hal keagamaan di Indonesia. Konsep trilogi kerukunan (tri kondial) lahir pada masa Alamsyah Prawiranegara. Trilogi tersebut adalah: 1) kerukunan internal antara berbagai aliran dala satu agama tertentu; 2) kerukunan antaragama; 3) kerukunan antara berbagai agama dengan pemerintah.

Ada nuansa kesatuan dan penyeragaman ala Orde Baru dalam trilogi ini. Orde Baru sangat berkepentingan dengan stabilitas nasional, sehingga segala bentuk perbedaan dianggap mempunyai potensi konflik yang dapat mengancam program pembangunan. Sejak masa inilah terlihat perbedaan arah kebijakan tentang kerukunan antar umat beragama yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masa Mukti Ali dan sebelumnya, kerukunan itu berorientasi pada terciptanya dialog antar agama, baik intra maupun antar umat beragama yang saling bertentangan. Pada masa Alamsyah Prawiranegara, kerukunan itu berorientasi pada upaya pemerintah untuk mengontrol agama lewat kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah (Mujiburrahman : Vol. 17, No. 3, 2010). Hal ini tampak pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 30 Juni, saat keluar SK No. 35/1980 dibentuk Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB). Wadah tersebut terdiri dari para pemimpin organisasi keagamaan. Para pimpinan organisasi tersebut menyetujui untuk menandatangani pedoman dasar bagi hubungan antar umat beragama di Indonesia. Fungsi utama WMAUB adalah menjadi forum konsultasi dan komunikasi antar petinggi atau pemimpin agama.

Bentuk kegiatan badan tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang digagas oleh pemerintah maupun salah satu majelis agama, dengan kegiatan utama bermusyawarah

membahas berbagai hal terkait tanggungjawab, bersama dan kerjasama antar warga negara yang menganut berbagai agama berbeda. Namun WMAUB mendapat banyak kritikan karena program-programnya yang tidak membumi, disebabkan hanya melibatkan elit agamawan saja. Dari sinilah dapat dilihat karakteristik pimpinan tertinggi Departemen Agama. Jika Mukti Ali percaya bahwa kerukunan antar umat beragama harus dilakukan melalui dialog, maka Alamsyah menekankan pentingnya dialog melalui penciptaan peraturan (Mujiburrahan : 2006). Secara kelembagaan, ada dua institusi di dalam Kementerian Agama yang menangani program-program KUB sejak era Reformasi. Institusi pertama adalah Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Institusi ini mempunyai lima puslitbang yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Litbang. Isu-isu berkenaan dengan dialog dan kerukunan umat beragama ditangani oleh Puslitbang Kehidupan Beragama. Institusi ini mengurus perencanaan berbagai kebijakan KUB, termasuk penelitian dan sosialisasi regulasi. Institusi kedua adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di bawah Sekretariat Jendral. Institusi ini melaksanakan program-program operasional KUB. Hubungan diantara kedua institusi tersebut adalah bahwa Litbang dan Diklat Kemenag merupakan lembaga think tank Kemenag, sedang FKUB adalah lembaga fungsional dalam melaksanakan berbagai program di lapangan.

D. Wacana dan Praktik Dialog Antar Umat Bergama oleh Lembaga Akademik

Sejarah studi agama di Indonesia kontemporer bisa dikatakan mulai berkembang setidaknya pada tahun 1960-an, di mulai dari masa ketika Mukti Ali menjadi ketua jurusan perbandingan agama di IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta 1961. Dia acapkali menampilkan dirinya sebagai muslim dan terkadang memberikan penilaian atas agama-agama lain berdasarkan perspektifnya sebagai muslim. Untuk waktu yang lama, pengajaran yang dilakukan maupun buku-buku teks yang ditulis oleh beberapa dosen mengenai agama lain cenderung melihatnya dari sudut pandang Islam, yang berakibat bias dan tidak berimbang. Bisa jadi hal itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa IAIN berada di bawah kementerian agama, yang oleh beberapa menterinya dipersepsi sebagai Departemennya orang Islam, dan memiliki fungsi dakwah.

Mulai terjadi pergeseran belakangan ini, karena beberapa sebab, sebagian mungkin pengiriman banyak dosen IAIN ke program studi agama di negeri-negeri barat, terdapat kecenderungan ke arah perkembangan studi agama mutakhir yang menekankan pada pendekatan non-confessional. Transformasi dari IAIN ke UIN nampaknya sedikit banyak mempengaruhi jurusan perbandingan Agama. Saat ini terdapat 52 Perguruan Tinggi Islam negeri (UIN/ IAIN / STAIN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir semua UIN /IAIN memiliki jurusan perbandingan agama, adapun STAIN yang tidak memiliki jurusan atau program studi perbandingan agama, memasukkan mata kuliah perbandingan agama, sosiologi agama, atau antropologi agama ke dalam jurusan Ushuluddin. Bahkan ada pula studi agama- agama di UIN Pekanbaru sebagai konsentrasi di bawah perbandingan agama dan UIN.

Makasar sebagai pogram studi. Sementara beberapa pernyataan di atas nampaknya secara umum berlaku untuk semua PTAI di Indonesia. Perkembangan

menyangkut dialog dapat dilihat di pusat-pusat studi. Di luar UIN / IAIN /STAIN, terjadi perkembangan mutakhir serupa. Mungkin bukan karena kebetulan jika pada dasawarsa 1990-an, kesadaran kuat akan pentingnya suatu kajian keagamaan yang sifatnya lebih objektif. Dalam artian tidak menghakimi agama lain dari perspektif agama masing-masing. Pada 1991, di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga didirikan program studi Pascasarjana Agama dan Masyarakat yang belakangan resmi namanya menjadi sosiologi agama. Pada tahun itu pula di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) muncul program studi agama-agama. Salah satu syarat berlangsungnya dialog dalam pengertian interaksi yang saling membuka diri bagi transformasi tidak akan terjadi dalam pendekatan confessional. Alternatif dari pendekatan tersebut adalah pemahaman agama secara historis, yaitu sebagai hasil interpretasi manusia terhadap sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran mutlak, yang terlibat dalam dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan begitu, agama dipandang sebagai suatu institusi sosial. Pendekatan itulah yang dicoba diterapkan dalam program pascasarjana Agama dan Masyarakat (sosiologi agama) di UKSW. Model yang dilakukan bukanlah mengajar berdasarkan pendekatan doktrinal, namun dengan melakukan analisis-analisis sosial dan filosofis, mengkaji kitab suci secara historis, untuk melihat fenomena keagamaan. Dalam perjumpaan sehari-hari, wajar jika orang berbicara dengan bahasa confessional. Namun di perguruan tinggi, khususnya jika ingin membuka perjumpaan dengan yang lain, pendekatan tersebut tidak dapat dipakai, meskipun yang dikaji adalah yang absolut, namun karena pengkajinya adalah subjek penyejarah, maka tafsiran kultural pun menjadi tak terhindarkan.

Dalam pengalaman program Ilmu Religi dan Budaya (IRB) di Sanata Darma, seperti disampaikan Sunardi, perpindahan dari berbicara tentang agama secara teologis ke non teologis tidak mudah dilakukan. Universitas Sanarta Darma (USD) sendiri telah memiliki fakultas teologi yang cukup mapan, baik di tingkat S1 maupun S2. Didirikan pada 1961, program studi ilmu teologi pada fakultas tersebut diakui sebagai fakultas teologi kepausan dan kini pada tingkat S2 juga menawarkan program pendidikan profesi Imamat. Dalam konteks perkembangan tersebut, kepentingan dan tantangan IRB diantaranya adalah untuk berbicara tentang agama dalam konteks non teologis. IRB sendiri sebetulnya tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai suatu program studi agama. Perspektif kajian budaya tampak lebih menonjol di situ. Perhatian utama IRB terarah pada pengembangan ilmu-ilmu sosial kemanusiaan secara interdisipliner dengan mengambil pengalaman budaya dan religi sebagai bidang kajiannya. IRB lebih membekali mahasiswanya supaya memiliki sikap yang empiris dalam menanggapi fenomena keagamaan. Hal yang perlu dilakukan mahasiswa adalah meneliti dan menganalisis secara kritis. Inilah sumbangan utama yang dapat diberikan perguruan tinggi tetapi tidak mengambil keputusan boleh atau tidak boleh, benar atau salah suatu fenomena.

Sebetulnya di Perguruan tinggi umum, dari segi silabus yang didesain departemen pendidikan nasional, mata kuliah pendidikan agama sudah cukup maju dengan menampilkan isu-isu kontekstual. Disamping itu, tersimpan potensi besar dalam perguruan tinggi umum darisegi keragaman komunitas keagamaan. Perjumpaan antar pemeluk agama menjadi sesuatu yang tidsak bisa dihindari, dengan sedikit memfasilitasi

hal itu, perjumpaan sehari-hari dalam konteks sekuler itu dapat segera menjadi dialog kehidupan (dataran pertama) yang baik. Sayangnya dalam atmosfer non keragaman itu ketika agama dibicarakan (dalam matakuliah pendidikan agama) keragaman tersebut justru dipotong dan mahasiswa diekskusi dari teman-temannya yang berasal dari latar agama yang berbeda.

Aspek lain dari perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum yang dibanyak tempat diamati kian memiliki atmosfer keagamaan yang makin kental dan polarisasi komunitas-komunitas agama. Di satu sisi hal itu, merupakan realitas sosiologis yang tidak berbeda jauh atau bahkan paralel dengan makin kerasnya penegasan identitas agama-agama di ruang-ruang publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks perguruan tinggi, hal itu ditandai dengan makin marak dan aktifnya organisasi-organisasi keagamaan (tampaknya dari semua komunitas beragama) baik yang menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa maupun yang berbasis di luar kampus. Dalam situasi tersebut, rasanya merupakan hal yang wajar jika kita berfikir bahwa aktivitas lintas agama selayaknya mendapatkan tempat pula. Yang menjadi tanggapan di situ adalah bagaimana meningkatnya kesadaran keagamaan tersebut tidak mengarah pada eksklusivisme, tapi justru membuka peluang bagi interaksi diantara kelompok-kelompok tersebut (J.B. Banawiratma : 2010).

E. Dialog Antra Agama di Indonesia sebagai Gerakan Sosial Keagamaan

Aliran-aliran dalam konsep ketuhanan ini berbeda dengan perkembangan dari Setidaknya, terdapat tiga konsep kunci dalam teori gerakan sosial yang memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu adalah: 1) struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*); 2) struktur mobilisasi (*mobilizing structures*); 3) pembingkai aksi (*framing*). Peneliti mengulas gerakan dialog antar agama di Indonesia dengan memakai ketiga konsep tersebut. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat dua gerakan yang dibahas dalam makalah ini, yaitu gerakan dialog antar agama yang dilakukan oleh negara, dan gerakan dialog antar agama yang dilakukan oleh lembaga akademis.

1. Struktur Kesempatan Politik (*political opportunity structure*)

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Negara dalam kerangka Kerukunan Umat Beragama (KUB) sangat berkaitan dengan situasi politik yang melingkupinya. Hal ini terlihat dari berbagai perubahan kebijakan negara. Misalnya adalah perubahan pada institusi bentukan pemerintah terkait KUB. Dimulai dari Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB), kemudian Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), selanjutnya Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Perubahan institusi ini tidak hanya terkait dengan nama dari institusi tersebut, tetapi juga ada hubungannya dengan visi dan misi yang dibangun oleh pemerintah saat itu. Pada masa Orde Baru, paradigma yang dibangun adalah kesatuan dan otoritarianisme. Sehingga segala bentuk perbedaan, sekecil apa pun itu, diredam dan diminimalisir. Sedang pada masa Reformasi, wacana multikulturalisme mulai tumbuh dan dianut oleh pemerintah. Sehingga bisa terlihat perbedaan antara,

misalnya, WMAUB dan FKUB. WMAUB adalah alat kontrol negara terhadap umat beragama di Indonesia, sedang FKUB adalah partisipasi masyarakat terhadap berbagai persoalan kerukunan umat beragama di daerah masing-masing.

Perbedaan berikutnya bisa dilihat dari tarik ulur rekognisi agama Khonghucu. Pada awalnya, agama ini diakui oleh negara, sebagaimana tertera pada PP No. 1/PNPS/1965. Kemudian dicabut oleh Presiden Soeharto melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tertanggal 18 Nopember 1978, dan pada akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan pengakuan agama Khonghucu melalui Keputusan Presiden RI No. 6 / 2000. Perubahan-perubahan ini sangat terkait dengan situasi politik saat itu.

Begitu pula yang terjadi pada lembaga-lembaga akademis. Kebijakan politik yang diambil oleh Mukti Ali, dengan slogannya *agree in disagreement* dan *scientific cum doctriner*, menyebabkan kajian Perbandingan Agama mulai semarak ditelaah pada ranah akademik. Jika saat itu Mukti Ali hanya sebagai cendekiawan saja, tanpa jabatan Menteri Agama, maka bisa jadi kajian Perbandingan Agama belum segemerlap tahun 1970an itu. Begitu pula perubahan arah kajian, dari Perbandingan Agama ke Studi Agama, juga dipengaruhi situasi politik era reformasi yang mengedepankan eksotisme partikularitas dalam paradigma multikulturalisme. Hal ini juga berpengaruh pada dibukanya kajian Studi Agama pada universitas negeri umum yang tidak berafiliasi dengan agama, seperti Universitas Gadjah Mada, karena selama ini Studi Agama biasanya hanya dikaji pada universitas yang berafiliasi dengan agama tertentu.

2. Struktur Mobilisasi (*mobilizing structures*)

Isu kerukunan umat beragama mampu menggerakkan hampir seluruh elemen masyarakat. Dari perjalanan wacana dan praktik dialog antar agama yang dilakukan, baik oleh negara maupun lembaga akademis, setidaknya terdapat empat elemen sosial yang ikut berkecimpung dalam isu ini, yaitu elit agamawan, birokrat, akademisi, dan para pemeluk agama. Misalnya pada saat Menteri Agama KH M. Dachlan, yang diajak dalam forum Musyawarah Antaragama pada 30 November 1967 adalah para elit agamawan. Kemudian pada masa Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara, maka birokrat pun ikut andil dalam isu KUB. Hal ini terlihat dari Konsep trilogi kerukunan (*tri kondial*) yang ia ciptakan. Kemudian pada masa Menteri agama Tarmizi Taher, para akademisi dilibatkan, sehingga KUB di Indonesia dikaji secara mendalam dan disiarkan secara internasional.

Kemudian pada masa Menteri Agama Maftuh Basuni, partisipasi para pemeluk merupakan komponen penting pada isu-isu KUB. Begitu pula yang terjadi pada lembaga-lembaga akademis. Pada mulanya kajian kerukunan umat beragama hanya dikaji oleh para akademisi agama saja. Namun perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa kajian tersebut menarik minat akademisi dari berbagai ranah keilmuan. Maka pendekatan multidisipliner pun tak terelakkan. Akademisi dari berbagai disiplin ilmu kini dapat menyumbangkan pikiran dan gagasannya terkait isu KUB di Indonesia. Pendekatan multidisipliner inilah yang menjadi salah satu faktor perubahan kajian agama di

Indonesia, yang semula adalah Perbandingan Agama menjadi Studi Agama. Keikutsertaan akademisi dari berbagai disiplin ilmu makin memperkaya kajian agama, serta mampu memberikan warna yang berbeda dibandingkan kajian-kajian yang dilakukna sebelumnya.

3. Pembingkaiian Aksi (framing)

Secara umum, framing yang dilakukan oleh negara terkait kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 1) Visi pemerintahan secara umum dengan melihat situasi dan kondisi keindonesiaan dan global; 2) Kapasitas Menteri Agama. Dua faktor ini berperan andil cukup besar dalam mengolah wacana dan praktik dialog antar agama yang dilakukan oleh negara. Misalnya visi pemerintahan Orde Baru tentang peredaman konflik demi pembangunan nasional, maka kapasitas Alamsyah Prawiranegara yang berlatar belakang militer dianggap mumpuni mengemban amanat untuk menjabat sebagai Menteri Agama. Begitu pula saat didengungkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan di Indonesia, maka Munawir Sjadzali yang berlatar belakang pendidikan politik Islam didaulat menjadi Menteri Agama, demi meyakinkan berbagai organisasi keagamaan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama mana pun. Maka ia pun berkeliling ke berbagai pondok pesantren untuk meyakinkan hal tersebut.

Framing juga terlihat pada institusi KUB bentukan pemerintah, semisal FKUB. Di dalam FKUB, kearifan lokal sangat diakomodasi. Sehingga berbagai solusi yang ditawarkan oleh FKUB bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi dan ditolerir karena persoalan yang dihadapi suatu daerah membutuhkan solusi unik yang khas daerah tersebut. Framing akomodasi kearifan lokal ini disambut baik oleh segenap kalangan. Hal ini terbukti telah dibentuknya FKUB di hampir seluruh propinsi dan sebagian besar kabupaten di Indonesia. Meski demikian, terdapat berbagai ironi terkait keputusan-keputusan yang diambil oleh negara. Semisal sikap Kementerian Agama yang kurang tegas, antara melindungi minoritas dan hak warga negara, serta tekanan kelompok mayoritas. Berbagai kesulitan ini terjadi karena negara Indonesia mempunyai posisi unik, yaitu antara negara sekuler dan negara agama. Posisi 'diantara' inilah yang menyebabkan tarik ulur kepentingan masih akan terus terjadi.

Berbagai ulasan yang peneliti paparkan di atas terkait dengan masalah Dialog Antar Agama di Indonesia dalam Teori Gerakan Sosial, sesungguhnya menyisakan kegelisahan akademik bagi peneliti. Muara dari kegelisahan tersebut adalah pada definisi Gerakan Sosial sebagaimana diutarakan oleh para ahli. Misalnya Doug McAdam dan David A. Snow yang mengatakan bahwa terdapat lima elemen pada Gerakan Sosial, yaitu: 1) Aksi kolektif; 2) Adanya tujuan yang berorientasi perubahan; 3) Pengorganisasian; 4) Adanya keberlanjutan temporal; 5) Aksi kolektif ekstrainstitusional, atau setidaknya percampuran antara aktivitas ekstrainstitusional (berdemonstrasi di jalanan) dan institusional (lobi-lobi politik).²⁴ Selain itu, Teori Gerakan Sosial juga berusaha memotret aksi-aksi kolektif dan protes sekelompok aktor sosial yang berupaya menggugat kekuasaan elite, otoritas, ataupun lawan-lawan politik mereka. Inilah yang mendorong



sarjana-sarjana gerakan sosial kontemporer seperti Mancur Olson, Mayer Zald, dan Anthony Oberschall menamainya sebagai 'teori mobilisasi sumber daya'.²⁵ Teori mobilisasi sumber daya cenderung melihat gerakan sosial sebagai aksi kolektif rasional, terorganisasi dan sadar tujuan. Keberhasilannya pun sangat ditentukan oleh kecekatan aktor-aktor gerakan untuk mengorganisasi kekecewaan, meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, sekaligus memanfaatkan jaringan-jaringan solidaritas sosial yang ada dan membagi insentif untuk mencapai konsensus bersama.

Bila hal di atas diamini, maka bagaimanakah menempatkan gerakan keagamaan yang dilakukan oleh negara (pemerintah Indonesia) dalam wacana dan praktik dialog antar agama? Dapatkah gerakan keagamaan itu dikategorikan sebagai gerakan sosial? Bila merujuk pada uraian di atas tentang teori gerakan sosial atau teori mobilisasi sumber daya, maka menurut peneliti gerakan keagamaan yang dilakukan oleh negara tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial. Hal ini dikarenakan gerakan keagamaan yang dilakukan oleh negara berada pada arus top-down, sedangkan mobilisasi sumber daya berada pada arus bottom-up. Dengan demikian, gerakan keagamaan yang dilakukan oleh selain negaralah yang bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial, semisal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga akademis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau ormas-ormas keagamaan.

Arus top-down yang dilakukan oleh negara cenderung mempertahankan status quo. Sedangkan arus bottom-up cenderung menggugat status quo, meski tentunya tidak semua gerakan dari bawah pasti menentang status quo. Contoh konkritnya adalah permohonan pembatalan PP No. 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh berbagai LSM yang bergerak di bidang dialog antar agama, pada tahun 2010, yang didukung oleh beberapa akademisi. Namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 April 2010. Di luar permasalahan setuju atau tidak setuju dengan keputusan MK ini, tetapi peristiwa penggugatan Peraturan Pemerintah ini adalah bukti bahwa kadangkala terjadi ketegangan antara arus top-down dan arus bottom-up perihal kerukunan umat beragama.

Lalu teori apakah yang bisa menjelaskan keterlibatan negara dalam wacana dan dialog antar agama di Indonesia? Mungkin teori perubahan sosial struktural fungsional bisa membantu menganalisisnya. Teori ini menyatakan bahwa persoalan dalam masyarakat bisa dijawab dengan mencari faktor yang mengintegrasikan suatu masyarakat. Ia berusaha mempertahankan agar secara keseluruhan suatu organisasi mempunyai kemampuan untuk menjaga substansi agar tetap sama dan tidak berubah (equilibrium). Alasan inilah yang menyebabkan mengapa analisis fungsionalisme struktural dianggap mendukung serta mempertahankan status quo. Pertimbangannya, dalam teori fungsionalisme struktural jika terjadi penyimpangan atau ketidakberesan maka sistem sosial akan berusaha mempertahankan ekuilibrium, sehingga keteraturan merupakan norma dari sistem tersebut. Hal ini yang disebut dengan 'teoretic consensus'.²⁶

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti mencoba membedakan antara gerakan sosial dan gerakan keagamaan. Gerakan sosial lebih bersifat bottom-up, sedangkan gerakan keagamaan lebih fleksibel dan elastis. Fluiditas gerakan keagamaan lebih terasa

dibandingkan dengan gerakan sosial. Gerakan keagamaan bisa dilakukan baik dalam arus top-down maupun bottom-up. Gerakan keagamaan bisa bersifat mempertahankan status quo, atau bisa juga menggugat keajegan status quo. Hal tersebut terlihat pada pembahasan di makalah ini tentang dialog antar agama di Indonesia, dimana wacana dan praktik gerakan keagamaan tersebut bisa dilakukan oleh negara (top-down) maupun kelompok masyarakat, semisal lembaga- lembaga akademis (bottom-up).

Kesimpulan

Kerukunan Umat Beragama (KUB) belum menjadi fokus perhatian para pendiri Negara Indonesia. Permasalahan utama mereka saat itu adalah integrasi bangsa dan mempertahankan kemerdekaan dari upaya perebutan kembali kekuasaan politik oleh para penjajah. Pendirian Departemen Agama pun bukanlah berlatar belakang KUB, tetapi berdasar kompromi bentuk negara antara negara sekular dan negara berdasar agama (Islam khususnya). Secara kelembagaan, ada dua institusi di dalam Kementerian Agama yang menangani program-program KUB sejak era Reformasi. Institusi pertama adalah Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Institusi ini mempunyai lima puslitbang yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Litbang. Isu-isu berkenaan dengan dialog dan kerukunan umat beragama ditangani oleh Puslitbang Kehidupan Beragama. Institusi ini mengurus perencanaan berbagai kebijakan KUB, termasuk penelitian dan sosialisasi regulasi. Institusi kedua adalah Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) di bawah Sekretariat Jendral. Institusi ini melaksanakan program-program operasional KUB.

Hubungan diantara kedua institusi tersebut adalah bahwa Litbang dan Diklat Kemenag merupakan lembaga think tank Kemenag, sedang FKUB adalah lembaga fungsional dalam melaksanakan berbagai program di lapangan negara (arus top-down) dan lembaga-lembaga akademis (arus bottom-up) mencoba mengkaji gerakan keagamaan dalam ranah dialog antar agama ini dengan memakai teori gerakan sosial. Terdapat tiga konsep kunci dalam teori gerakan sosial yang biasanya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan aksi-aksi kolektif. Ketiga konsep itu meliputi (1) struktur kesempatan politik (political opportunity structure), (2) struktur mobilisasi (mobilizing structures), dan (3) pbingkaian aksi (framing).

REFERENSI

- Ali, A. Mukti. (1970). *Dialog Antar Agama*, Jogjakarta: Jajasan Nida.
- Ardiansyah (2012). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah, *Jurnal Toleransi*, Vo. 4, No. 1.
- Armstrong, Karen. (2002). *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun*, terj. Zaimul Am, Bandung: Mizan Media Utama.
- Dja'far, Halimah. (2006). *Modernisasi Keagamaan Islam Di Indonesia - Tela'ah Pemikiran A. Mukti Ali*, *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 21, No. 2.
- Djam'annuri. (1993). *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

- Fathuddin, Usep. (1998). H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan' dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik, Jakarta: INIS, PPIM, dan Litbang Kemenag.
- Harahap, Nursapia. (2014). Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, volume 08 No 01, Mei.
- Husin, Khairah. (2014). Peran Mukti Ali Dalam Pengembangan Toleransi Antar Agama Di Indonesia, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI, No. 1.
- Inyiaq Ridwan Muzir dan M. Syukri (Yogyakarta: Ircisod, 2012).
- J.B. Banawiratma (ed.) (2010). *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Knitter, Paul F. (1995). *One Earth Many Religions - Multifaith Dialogue and Global Responsibility*, Maryknoll, New York: Orbis Books.
- Maguire, Daniel C. (2004). *Energi Suci*, Yogyakarta: Pohon Sukma.
- Mojzes, Leonard Swidler dan Paul. (2000). *The Study of Religion in an Age of Global Dialogue*, Philadelphia: Temple University Press.
- Mujiburrahan. (2006). *Feeling Threatened; Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*, Leiden: Amsterdam University Press.
- Mujiburrahman. (2008). *State Policies on Religious Diversity in Indonesia*, *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol.
- Mujiburrahman. (2010). *Religion and Dialogue in Indonesia: From The Soeharto Period to The Present*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 17, No. 3.
- Pals, Daniel L. (2012). *Seven Theories of Religion - Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif*, terj.
- Rahmadi. (2015). *Pemikiran Metodologis A. Mukti Ali Tentang Penelitian Agama*, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2.
- Ulinuha, Roma. (2011). *Occidentalism In Indonesia; A Study Of Intellectual Ideas Of Mukti Ali And Nurcholis Madjid And Contemporary Legacy*, *Jurnal Esensia*, Vol. XII, No. 1.
- Wirawan, I.B. (2013). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma - Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana.